

Posisi Tawar Timor Leste untuk Memperoleh Status Keanggotaan Penuh di ASEAN (*Bargaining Position of Timor Leste in Achieving Full Membership Status in ASEAN*)

Dian Ayu Rohani, Bagus Sigit Sunarko, Pra Adi Soelistijono
Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, FISIP Universitas Jember
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail: rohaniayudian@rocketmail.com, bgs_sigit@yahoo.com

Abstract

After more than a decade as an observer, Timor Leste's application to become the eleventh member of the ASEAN has officially submitted on 4 March 2011. Indeed, despite being the youngest country in ASEAN, Timor Leste has already made substantial contributions to the region of South East Asia through its involvement in several ASEAN events included the ASEAN Regional Forum (ARF) in 2005. The problem is that there are some doubts of its ability to fulfil all the membership obligations at this time. While Indonesia is actively sponsoring Timor Leste's application for membership in ASEAN and strongly believes that this country is ready to becoming part of the ASEAN Community, some suppose that Timor Leste is not yet ready. The purpose of this study is to evaluate the position of Timor Leste in its attempts to join the ASEAN. The study employs qualitative analysis and utilizes some models of diplomacy and ASEAN charter in examining the efforts that Timor Leste has done in achieving full membership status in this regional organization. The data for the research was collected through secondary sources. The study concluded that Timor Leste has boosted its bargaining position in the last few years and its acceptance into ASEAN is only a matter of time.

Keywords: *Timor Leste, ASEAN, bargaining position, diplomacy, ASEAN charter*

Pendahuluan

Timor Leste merupakan negara berdaulat yang resmi berdiri pada tanggal 20 Mei 2002 dengan nama resmi *Republica Democratica de Timor Leste*. Sebagai negara yang masih sangat muda, sudah barang tentu keputusan untuk membangun hubungan atau kerjasama dengan negara-negara tetangga, terutama yang terletak dalam satu kawasan regional Asia Tenggara yang telah lama eksis dan terhimpun dalam organisasi regional bernama *Association of South East Asian Nations* (ASEAN) merupakan sebuah kebutuhan penting dan mendesak untuk segera direalisasikan (Ximenes, 2011: 370). Keinginan untuk bergabung menjadi anggota tetap ASEAN (dengan memperoleh status keanggotaan penuh di ASEAN) semakin kuat, terlebih setelah mengamati kerjasama antarnegara dalam ASEAN dan mendapatkan kesimpulan bahwa kiprah organisasi ini selalu mengalami perkembangan positif baik pada tataran regional maupun internasional.

Keputusan Timor Leste untuk berintegrasi dengan negara-negara se-kawasan yang sama, yaitu Asia Tenggara, yang terhimpun dalam institusi ASEAN ini selanjutnya ditetapkan sebagai salah satu tujuan politik luar negeri Timor Leste sebagaimana termaktub dalam konstitusi Republik Demokratis Timor Leste (RDTL) Pasal 8 ayat 4: *The Democratic Republic of East Timor shall maintain special ties of friendship and co-operation with its neighbouring countries and the countries of the region*" (WIPO, 2002).

Adapun regulasi dalam ASEAN terkait dengan ketentuan penerimaan anggota baru, yakni berpedoman pada Piagam ASEAN Pasal 6 tentang penerimaan anggota baru, khususnya pada ayat 2 poin a dan b menyatakan: *Admission shall be based on the following criteria: (a) location in the recognised geographical region of Southeast Asia; (b) recognition by all ASEAN Member States* (Kemlu RI, 2013). Dengan demikian, pasal 6 Piagam ASEAN secara eksplisit telah menggariskan bahwa penerimaan anggota baru dalam ASEAN harus didasarkan pada kriteria, *pertama*, lokasi negara pelamar keanggotaan ASEAN tersebut harus berada di kawasan Asia Tenggara, *kedua*, penerimaan anggota baru harus mendapat pengakuan atau persetujuan dari seluruh negara anggota ASEAN.

Berdasar pada substansi ketentuan dalam piagam ASEAN dan adanya intensi kuat dari Timor Leste untuk menjadi bagian dalam organisasi tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji perihal upaya pemerintah Timor Leste bergabung menjadi anggota baru ASEAN dan memfokuskan kajian pada posisi tawar Timor Leste untuk memperoleh status keanggotaan penuh di organisasi regional tersebut. Dengan mengetahui posisi tawar Timor Leste, utamanya terhadap negara-negara anggota ASEAN yang selama ini masih belum memberikan persetujuan atas status keanggotaan negara ini di ASEAN, diharapkan dapat menjadi landasan bagi penstudi hubungan internasional untuk menilai apakah status keanggotaan penuh Timor Leste nantinya dapat

terwujud atau tidak.

Kerangka Pemikiran

Suatu penelitian mensyaratkan penggunaan kerangka pemikiran berupa teori atau konsep sebagai kerangka pemikiran untuk meneliti permasalahan sebagai obyek penelitian tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa konsep hal mana konsep didefinisikan sebagai abstraksi yang mewakili suatu obyek, sifat suatu obyek, atau suatu fenomena tertentu. Selaras dengan batasan tersebut, Mohtar Mas'ood berpendapat bahwa konsep pada hakekatnya menjadi suatu kata yang melambangkan suatu gagasan (Mas'ood, 1990: 110). Adapun konsep –konsep yang digunakan peneliti dalam mengkaji permasalahan pada penelitian ini terdiri dari konsep tentang diplomasi (diplomasi terbuka, diplomasi ekonomi, diplomasi politik) dan Piagam ASEAN.

Secara teoritik diplomasi merupakan manajemen sekaligus seni dalam menjalankan hubungan dengan berbagai aktor lintas batas negara sekaligus memprioritaskan pencapaian kepentingan nasional yang sejauh atau sebisa mungkin dilaksanakan dengan sarana damai, seperti melalui korespondensi, pembicaraan tidak resmi, saling menyampaikan cara pandang, *lobbying*, kunjungan dan aktivitas-aktivitas politis lainnya (Djelantik, 2008: 4 & Roy, 1991: 3).

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa diplomasi menjadi sarana utama dari upaya Timor Leste untuk membangun posisi tawar yang besar dalam memperoleh status keanggotaan penuh di ASEAN. Hal ini merupakan langkah yang tepat mengingat diplomasi sendiri memiliki kaitan yang sangat erat dengan politik luar negeri suatu negara (Djelantik, 2008: 4). Secara legal formal, diplomasi telah menjadi bagian dari politik luar negeri Timor Leste yang termuat secara implisit pada konstitusi RDTL (sebagai kebijakan luar negeri) dalam pasal 8 ayat 2:

The Democratic Republic of East Timor shall establish relations of friendship and cooperation with all other peoples, aiming at the peaceful settlement of conflicts, the general, simultaneous and controlled disarmament, the establishment of a system of collective security and establishment of a new international economic order capable of ensuring peace and justice in the relations among peoples.

Langkah-langkah diplomatik dengan intensif telah dijalankan oleh pemerintah Timor Leste untuk merintis terbukanya peluang atas keinginannya bergabung dalam ASEAN. Di antara model diplomasi yang dipilih oleh negara ini untuk memaksimalkan peluangnya adalah sebagaimana diuraikan berikut ini.

1. Diplomasi Terbuka

Diplomasi terbuka pada hakekatnya merupakan buah dari gagasan kaum liberal yang meyakini bahwa diplomasi yang dilaksanakan secara terbuka akan lebih

membantu pemeliharaan perdamaian dan keharmonisan internasional (Roy, 1991: 79). Dalam konteks diplomasi terbuka, Timor Leste memiliki strategi diplomasi yang disebut dengan diplomasi *Halo amigo ba ema hotu-hotu no la halo inimigu ba ema ida* artinya bersahabat dengan semua orang dan tidak memusuhi siapapun (Ximenes, 2011: 377). Lalu yang kedua yaitu “diplomasi pragmatis” artinya negara Republik Demokratik Timor-Leste *loke an* atau “membuka diri” kepada semua negara dan tidak memandang pada sejarah masa lalu melainkan pemerintah Timor-Leste lebih melihat ke depan bagaimana mendapatkan dukungan dari negara kawasan (Ximenes, 2011: 377).

Metode yang digunakan pada diplomasi terbuka yaitu deklarasi langsung dan terus terang, yakni maksud dan tujuan Timor Leste untuk bergabung dan memperoleh status keanggotaan penuh di ASEAN tercantum dalam konstitusi RDTL Pasal 8 ayat 2 dan 4 serta tersirat pada pernyataan langsung para pejabat pemerintahan Timor Leste yang secara terbuka dan dapat diakses pada masyarakat internasional tersebar melalui media massa. Di samping itu, upaya diplomasi terbuka Timor Leste untuk memperoleh status keanggotaan penuh di ASEAN juga termanifestasi dalam pernyataan para tokoh Timor Leste, kegiatan kunjungan, kerjasama, pembukaan kedutaan dan perwakilan diplomatik lainnya serta keikutsertaan Timor Leste dalam acara-acara regional ASEAN maupun internasional yang kesemuanya dilakukan secara terbuka dan dapat diakses publik luas.

2. Diplomasi Ekonomi

Sejak awal bergabung dalam ASEAN sebagai observer, Timor Leste mulai melancarkan diplomasi ekonomi sebagai bagaian dari upaya *capacity building* yang menjurus pada beberapa pilar kegiatan ekonomi seperti promosi perdagangan; promosi peluang investasi, manajemen bantuan internasional (Djelantik, 2008: 230).

3. Diplomasi Politik

Aspek diplomasi politik dikaitkan dengan suatu kebijakan negara dalam menghadapi atau menanggapi kebijakan yang digariskan negara lain ataupun dalam menyikapi suatu isu internasional lainnya (Basu, 2012: 77). Selanjutnya, aspek politik tersebut diatas ditambah dengan adanya fenomena *struggle for power* di antara negara-negara dalam fora internasional, menjelma menjadi basis yang esensial bagi signifikansi pelaksanaan diplomasi politik yang dipilih dan dipraktekkan oleh banyak negara. Demikian pula yang terjadi di Timor Leste, hal mana kepentingan negara tersebut mengarahkannya pada pilihan untuk melaksanakan diplomasi politik yang bertujuan untuk membangun posisi tawar yang lebih baik dalam kontestasi internasional. Hal ini secara resmi telah menjadi kebijakan Timor Leste sebagaimana termaktub dalam Konstitusi RDTL pasal 8 (2).

Kebijakan Timor Leste dalam menyikapi situasi internasional lantas memunculkan adanya prioritas kebijakan luar negeri, yakni mengutamakan untuk secara

cermat memperhatikan situasi kawasan ‘terdekat’ yang ada di sekitar Timor Leste yaitu Asia Tenggara. Kebijakan Timor Leste tersebut secara eksplisit tercantum dalam Konstitusi RDTL pasal 8 ayat 4.

Agenda atau kepentingan Timor Leste untuk membangun posisi tawar yang lebih baik dalam rangka memperoleh status keanggotaan penuh ASEAN ini tentu saja juga berkaitan erat dengan peranan para pemimpin politik serta diplomat Timor Leste dalam mengupayakan pencapaian kepentingan negara tersebut. Secara persuasif dan *non-violence*, mereka mengemas dan melakukan diseminasi atas keinginan Timor Leste untuk menjadi negara anggota penuh ASEAN melalui pernyataan maupun orasi; partisipasi aktif di beberapa forum regional dan internasional; dialog dan negosiasi dengan petinggi maupun tokoh-tokoh penting dari negara-negara anggota ASEAN, dengan tujuan untuk meraih dukungan dan bantuan guna melancarkan upaya Timor Leste menjadi negara anggota penuh di ASEAN.

Metode Penelitian

Metode pada dasarnya merupakan suatu kerangka dalam penelitian ilmiah yang dimulai dari proses pengumpulan data sampai dengan analisis data sesuai tujuan penelitian yang ingin dicapai serta dilandasi dengan evaluasi tentang akurasi dan validitas data serta fakta yang disajikan (Liang Gie 1984: 81). Metode penelitian dalam penelitian ini dibagi dalam dua metode yaitu, metode pengumpulan data dan metode analisis data. Metode pengumpulan data yang peneliti gunakan yaitu metode atau teknik penelitian kepustakaan (*library research*). Sedangkan metode analisis data yang peneliti gunakan adalah metode analisis deskriptif-kualitatif dan prediktif dengan berpedoman pada referensi dan data-data faktual dan kredibel.

Hasil dan Pembahasan

Serangkaian langkah-langkah politis telah dilakukan pemerintah Timor Leste guna membangun posisi tawar untuk memperoleh status keanggotaan penuh di ASEAN sejak tahun 2002. Upaya tersebut diawali Timor Leste dengan mengikuti *ASEAN Ministerial Meeting* (AMM) ke-39 di Kuala Lumpur (Malaysia) pada tahun 2002 untuk memperoleh status observer di ASEAN (*Malaysia Ministry of Foreign Affairs*, 2006). Boleh dikatakan bahwa pada saat itu Timor Leste secara cerdas telah berhasil memanfaatkan *event* AMM ini sebagai “langkah awal” untuk melakukan aksesi dalam organisasi ASEAN.

Semenjak menyandang status sebagai observer di ASEAN, Timor Leste selanjutnya aktif mengikuti sejumlah agenda ASEAN termasuk *ASEAN Regional Forum* (ARF) sebagai forum dialog utama ASEAN yang membahas persoalan pertahanan dan keamanan kawasan, pada tahun 2005 di Vientiane (Laos), (Alkatiri, 2012: 17). Buah dari keseriusannya dalam mengikuti kegiatan-kegiatan penting ASEAN, pada tahun 2011 Timor Leste berhasil memperoleh kehormatan dan hak istimewa untuk menjadi tuan rumah perhelatan ARF yang ke-5. Sebagai tahapan lebih lanjut

atas upaya diplomasi Timor Leste untuk berintegrasi lebih sinergis dan mutual dengan ASEAN, Timor Leste memutuskan untuk menandatangani [Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia](#) (TAC) pada tahun 2007 Di Cebu (Filipina), (*ASEAN Secretariat*, 2012).

Secara prosedural, untuk dapat diterima sebagai negara anggota ASEAN, Timor Leste harus memiliki perwakilan di semua negara anggota ASEAN. Oleh karena itu pemerintah Timor Leste lantas membuka sejumlah kantor perwakilan diplomatik (Kedutaan Besar-Kedubes) dan perwakilan konsuler (Konsulat Jenderal-Konjen) di negara-negara anggota ASEAN. Tidak saja hanya membuka instansi (kantor) perwakilan di negara lain, pemerintah Timor Leste juga membuka Sekretariat Nasional ASEAN di Dili (ibukota negara Timor Leste) pada tahun 2009 (R.Ravichandran, 2013).

Pada tahun 2011, pemerintah Timor Leste mulai menunjukkan upayanya pada tataran lebih serius dan formal untuk menjadi negara anggota ASEAN ke-11, dengan mengajukan aplikasi permohonan status keanggotaan penuh di ASEAN (Guterres, 2012). Di samping itu Timor Leste juga terus berupaya meningkatkan posisi tawarnya untuk segera memperoleh status keanggotaan penuh di ASEAN, dengan meningkatkan hubungan diplomatik dengan seluruh negara anggota ASEAN. Timor Leste secara intensif terus melakukan kunjungan diplomatik, *sharing* dan negosiasi yang melahirkan sekian kontrak kerjasama dengan kesepuluh negara anggota ASEAN.

Kegiatan diplomasi di bidang ekonomi juga gencar dilaksanakan kepada seluruh negara anggota ASEAN, melalui intensifikasi kegiatan perdagangan (ekspor-impor); membuka keran investasi; dan mengelola bantuan dari negara-negara anggota ASEAN untuk mendukung *capacity building* negara Timor Leste.

Berbagai sumber menyebutkan, hingga saat ini pemerintah Timor Leste terus melakukan serangkaian upaya diplomasi untuk memperoleh status keanggotaan penuh di ASEAN. Lantas bagaimanakah kemungkinan keberhasilan atas segenap upaya yang telah dilakukan dan bagaimana kita bisa menilai derajat tinggi atau rendahnya posisi nilai tawarnya dalam kasus ini?. Berikut adalah aspek-aspek yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk mengkaji posisi tawar Timor Leste dalam memperoleh status keanggotaan penuh di ASEAN, dengan mendasarkan pada identifikasi terhadap isi Piagam ASEAN sebagai landasan konstitusional dari organ ASEAN. Penulis berpendapat bahwa posisi tawar Timor Leste setidaknya dapat diukur dari sejauh mana berbagai potensi, kontribusi serta peran penting Timor Leste terhadap ASEAN di sejumlah bidang yang dikorelasikan dengan prinsip dan tujuan ASEAN yang termaktub dalam Piagam ASEAN terutama pada Bab I Pasal 1.

Peran Penting Timor Leste dalam Pemeliharaan Stabilitas Keamanan Kawasan Asia Tenggara

Posisi tawar Timor Leste untuk memperoleh status keanggotaan penuh di ASEAN dapat ditinjau dari peran penting dan pengaruh eksistensi negara ini dalam memelihara stabilitas kawasan sebagaimana menjadi

tujuan yang tertera pada Piagam ASEAN Bagian I Pasal 1 Ayat 1, hal mana salah satu tujuan keberadaan organisasi ini adalah *to maintain and enhance peace, security and stability and further strengthen peace-oriented values in the region*.

Timor Leste sempat berada pada situasi krisis yaitu dengan terjadinya instabilitas keamanan dan politik domestik pada kisaran tahun 2002 hingga memuncak pada tahun 2006 di mana terjadi konflik horizontal dan krisis politik antar *rulling elite* diikuti dengan persetujuan para pendukung masing-masing (kelompok *grass-root*) yang sempat sulit mencapai integrasi struktural dan menimbulkan kerusuhan yang destruktif di ruang publik (Wuryandari, 2011). Krisis stabilitas keamanan domestik di Timor Leste tersebut terjadi bersamaan dengan berjalannya upaya Timor Leste untuk memperoleh status keanggotaan penuh di ASEAN. Kekacauan sosial-politik domestik yang berimbas pada kemacetan pembangunan Timor Leste di segala bidang ini sempat membuat beberapa negara anggota ASEAN sangsi atas kesiapan Timor Leste menjadi negara anggota ASEAN.

Namun lambat laun pemerintah mampu melakukan berbagai upaya restorasi stabilitas domestik dengan melakukan upaya *capacity building* secara efektif, ditunjukkan dengan pulihnya kondisi keamanan, politik dan pemerintahan Timor Leste menjadi relatif cukup kondusif paska tahun 2006. Timor Leste yang sebelumnya memiliki budaya konflik kini telah berbalik menjadi negara yang berbasis rekonsiliasi dan perdamaian.

Semenjak masa restorasi stabilitas domestik berjalan, Timor Leste mampu membuktikan bahwa negara ini sanggup memenuhi tujuan ASEAN terkait perwujudan stabilitas keamanan kawasan Asia Tenggara yang memerlukan suatu pengamanan komprehensif dari segala bentuk ancaman, kejahatan transnasional, dan dari segala ancaman serta tantangan di perbatasan antarnegara Asia Tenggara. Hal tersebut secara tegas juga menjadi salah satu aspek yang menjadi perhatian organisasi, sebagaimana tersurat dalam Piagam ASEAN Bab I Pasal 1 Ayat 8, yang menyatakan salah satu tujuan organisasi ini adalah *to respond effectively, in accordance with the principle of comprehensive security, to all forms of threats, transnational crimes and transboundary challenges*.

Timor Leste telah mewujudkan amanat isi pasal Piagam ASEAN tersebut, antara lain dengan menciptakan penyelenggaraan Pemilu yang kondusif dan *fair*; adanya peningkatan upaya pemberantasan korupsi; penguatan institusi hukum dan keseriusannya dalam membendung kejahatan transnasional yang terorganisir meliputi perbudakan seks, penyelundupan manusia (*people smuggling*), peredaran NARKOBA, dan pencucian uang (dengan implikasi positif, di Timor Leste tercatat tidak terdapat kejahatan terorganisir); serta adanya potensi Timor Leste mengatasi permasalahan pengungsi dan *illegal movement* sebagai salah satu isu *human security* yang cukup penting di kawasan.

Kemudian, terkait pencapaian tujuan organisasi

dalam mewujudkan stabilitas keamanan kawasan sesuai ketentuan Piagam, agaknya ASEAN perlu segera mempertimbangkan secara seksama kesediaannya untuk menerima atau tidak dapat menerima niat keanggotaan Timor Leste dalam ASEAN. Jika Timor Leste tidak segera diterima menjadi anggota ASEAN atau bahkan ditolak, besar kemungkinan Timor Leste akan memilih lebih mengintensifkan hubungan luar negerinya dengan asosiasi-asosiasi maupun negara-negara lain di luar ASEAN yang berafiliasi kuat dengan Timor Leste. Timor Leste dapat mengintensifkan hubungan luar negerinya dengan negara-negara non-ASEAN, seperti Australia, Cina, dan Amerika Serikat (AS).

Australia, misalnya, tercatat memiliki kedekatan dan ikatan historis kuat dengan Timor Leste hingga saat ini. Timor Leste intens mengimpor produk dari Australia, melakukan serangkaian kerjasama seperti di bidang pengelolaan migas, dan menerima bantuan di berbagai bidang. Jika peranan signifikan Australia terhadap Timor Leste tersebut terjadi, hal tersebut dikuatkan akan berimbas pada kemungkinan lain, yakni Australia dapat melangsungkan peran ganda layaknya *deputy sheriff* atau kepanjangan tangan dari negara adidaya macam AS (yang notabene merupakan aliansi atau sekutu utama Australia) untuk melakukan infiltrasi pengaruh dan kepentingan AS di Asia Tenggara, terutama dalam upaya membendung atau menandingi kekuatan dan pengaruh Cina di kawasan ini.

Sementara, terkait dengan negara Cina, ditemukan indikasi kuat bahwa selama berafiliasi dengan Timor Leste, pengaruh negara Komunis ini cenderung meningkat terutama paska krisis politik domestik di Timor Leste. Selama krisis memuncak pada kisaran tahun 2006, ketika banyak warga negara asing meninggalkan Timor Leste, kecuali satu perwakilan negara yang memutuskan tetap berdiam atau menetap di Timor Leste di tengah memuncaknya krisis tersebut, yaitu negara Cina.

Pada saat itu, Cina secara konsisten terus melangsungkan kegiatan investasi dan bantuan internasional, dan bahkan tercatat selama dan paska krisis kegiatan Cina tersebut meningkat tiga kali lipat. Hal demikian bisa menjadi sebuah indikator demikian pentingnya Timor Leste bagi Cina. Selanjutnya, situasi ini berpotensi mendorong Timor Leste untuk melegitimasi kedekatannya dengan Cina dalam kerjasama yang lebih intensif dan jika itu terjadi maka akan dapat menjelma menjadi ancaman yang cukup menggelisahkan bagi keamanan negara-negara di kawasan Asia Tenggara.

Potensi masuknya pengaruh Cina tersebut perlu dipertimbangkan dan diantisipasi ASEAN terkait pemeliharaan stabilitas keamanan; sosial; ekonomi, dan otoritas di kawasan, terutama mencegah hegemoni Cina yang ekspansif dan terselubung (melalui strategi *soft power*). Sampai saat ini, jika eksistensi Timor Leste masih berada di luar ASEAN (belum atau tidak menjadi negara anggota ASEAN), Timor Leste dapat menjadi *blind spot* (wilayah “samar-samar”) di tengah-tengah entitas kawasan, yang berpotensi memunculkan problem

kontrol kolektif ASEAN atas stabilitas regional terhadap ancaman kekuatan asing (negara-negara non-ASEAN).

Timor Leste dapat menjadi “negara boneka” serta menjadi “batu loncatan” atau pintu masuk bagi ekspansi pengaruh dan kepentingan Australia dan Cina beserta aliansinya untuk *me-monitoring* kepentingan dan mobilitas vital ASEAN serta menginfiltrasi pengaruh dan segala kepentingan di kawasan Asia Tenggara. Australia yang merupakan sekutu AS, sementara AS memiliki kecenderungan hubungan rivalitas hegemonik dengan Cina. Rivalitas hegemonik tersebut dapat dilancarkan melalui perdagangan yang ‘menyerbu’ pasar Timor Leste dan merambah masuk ke pasar ASEAN secara luas dengan memanfaatkan mekanisme *free trade* dan dengan menawarkan mekanisme pasar lainnya sesuai strategi masing-masing yang dianggap menguntungkan. Rivalitas hegemonik negara-negara kuat non-ASEAN tersebut dapat berlanjut pada persaingan kontrol dan kekuatan militer di Timor Leste dan berpotensi tinggi menjadi stimulus insecuritas regional.

Lebih jauh, rivalitas hegemonik di Asia Tenggara tersebut dapat berekskalasi menjadi potensi ancaman terselubung oleh kedua negara, sekiranya kedua negara adidaya tersebut memutuskan untuk membangun sistem persenjataan pemusnah massal (*Weapon Of Mass Destruction-WMD*) baik secara langsung di wilayah kedaulatan Timor Leste maupun di luar wilayah Timor Leste yang masih di seputar kawasan Asia Tenggara. Hal ini mungkin bisa terjadi apabila negara-negara besar non-ASEAN di Timor Leste sampai pada satu keputusan untuk melaksanakan misi yang lebih ekspansif yakni sebagai upaya menangkal ancaman dan menandingi kekuatan negara-negara lain yang merupakan aliansi blok Cina dan AS maupun yang bukan merupakan blok kedua negara berpengaruh tersebut.

Kemungkinan berkembangnya aktivitas proliferasi nuklir atau potensi pembangunan instalasi WMD oleh negara-negara kuat non-ASEAN yang memanfaatkan eksistensi dan posisi Timor Leste ini sudah barang tentu menyimpang dan bahkan dapat menjauhkan tujuan dan prinsip ASEAN yang menyuarakan kepada seluruh negara anggota ASEAN untuk memelihara kawasan Asia Tenggara sebagai zona bebas persenjataan nuklir dan segala senjata pemusnah massal, sesuai yang ditegaskan pada Piagam ASEAN Bab I Pasal 1 Ayat 3 yang menyatakan bahwa tujuan ASEAN juga termasuk *to preserve Southeast Asia as a Nuclear Weapon-Free Zone and free of all other weapons of mass destruction*.

Potensi ancaman nuklir dan WMD di Asia Tenggara dalam konteks ini dapat dihindari ASEAN jika menetapkan kebijakan untuk memasukkan Timor Leste dalam keanggotaan penuh dalam ASEAN. Logikanya, jika Timor Leste resmi bergabung menjadi negara anggota ASEAN, maka tumbuh komitmen, idealisme, dan rasa tanggung jawab dalam “diri” (politik luar negeri) Timor Leste untuk menunaikan tujuan dan prinsip ASEAN dan ikut serta menjadikan Asia Tenggara sebagai zona bebas nuklir dan WMD, sekalipun Timor Leste memiliki kedekatan dan hubungan yang sangat intensif dengan negara-negara

non-ASEAN yang berpengaruh seperti Cina, AS, Australia beserta aliansinya masing-masing.

Peran Penting Timor Leste dalam Meningkatkan Kerjasama Regional dan *Capacity Building* di Kawasan Asia Tenggara

Hubungan dan aktivitas kerjasama antarnegara ASEAN dalam cakupan regional maupun secara internasional merupakan suatu keniscayaan yang menjadi prinsip dan tujuan ASEAN. Hal ini tersirat jelas dalam Piagam ASEAN Bagian I Pasal 1 Ayat 2, yang menyebutkan bahwa salah satu tujuan organisasi regional ini adalah *to enhance regional resilience by promoting greater political, security, economic and socio-cultural cooperation*. Posisi tawar Timor Leste untuk menjadi negara anggota ASEAN antara lain dapat dinilai dari rekam jejak dan kesungguhan Timor Leste dalam menunaikan amanat Piagam ASEAN tersebut. Sejak Timor Leste hadir sebagai negara baru, negara ini tercatat telah menyelaraskan politik luar negerinya agar bersesuaian dengan prinsip-prinsip dasar ASEAN sebagaimana tersirat pada konstitusi RDTL pasal 8 ayat 4.

Setelah memasuki tahap restorasi dan transisi dari masa krisis yang terakhir dialami yakni paska krisis politik domestik yang memuncak pada tahun 2006, Timor Leste bisa dikatakan dapat melaksanakan pembangunan dengan arah dan hasil yang relatif lebih baik. *Capacity building* yang dilakukan mampu mengurangi kemiskinan di Timor Leste sehingga Negara ini tidak lagi terpuruk dan setahap demi setahap mulai mengejar ketertinggalan pembangunannya dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara lainnya. Upaya Timor Leste yang dimaksud di antaranya dengan mengembangkan sektor unggulan domestik seperti pertanian dan perikanan, pengembangan industri dengan memanfaatkan investasi asing yang memberikan peluang adanya transfer iptek, serta pengembangan pasar dan sektor wisata.

Kerjasama mutual terutama di bidang ekonomi, politik, dan sosio-kultural yang bertujuan untuk menanggulangi atau meminimalisir *gap* antar anggota ASEAN, sebagaimana tersirat dalam Piagam ASEAN Bab I Pasal 1 Ayat 6: *to alleviate poverty and narrow the development gap within ASEAN through mutual assistance and cooperation* secara serius juga telah dirumuskan dan dilaksanakan. Semenjak menyatakan diri ingin menjadi anggota ASEAN, negara yang baru berdiri pada tahun 2002 ini telah berusaha menerapkan prinsip ASEAN tersebut dengan melakukan diplomasi ekonomi berorientasi pada *capacity building*. Pelan namun pasti Timor Leste telah menuai hasil dari program *capacity building* yang telah dilakukan terutama yang berkenaan dengan upaya pemenuhan persyaratan keanggotaan ASEAN.

Langkah-langkah yang telah berhasil dilaksanakan antara lain adalah: Timor Leste mampu membuka perwakilan diplomatik dan konsuler serta Sekretariat Nasional ASEAN dengan menempatkan seperangkat staf diplomatik, secara kontinyu senantiasa mengirimkan delegasinya dalam setiap pertemuan ASEAN, dan

Negara inipun telah ikut serta dalam *SEA GAMES* (*Southeast Asia Games*) sebagai suatu upaya pendekatan publik oleh Timor Leste di kawasan untuk melaksanakan integrasi sosio-kultural sebagai adaptasi terhadap agenda *ASEAN Community 2015*.

Akhirnya program *capacity building* yang dilakukan Timor Leste tercatat memberi kontribusi positif pada *Human Development Index (HDI)* di Timor Leste. Kemajuan yang dicapai setidaknya berhasil memenuhi tujuan dan prinsip ASEAN yang termaktub dalam Piagam ASEAN Bab I Pasal 1 Ayat 11, yang menyatakan bahwa organisasi bermaksud pula *to enhance the well-being and livelihood of the peoples of ASEAN by providing them with equitable access to opportunities for human development, social welfare and justice*. Sampai dengan tahun 2012, tingkat HDI Timor Leste berada pada tingkat menengah (*medium human development category*). Penting untuk diketahui bahwa pada tahun 2010 saja peringkat HDI Timor Leste mampu berada di atas peringkat beberapa negara ASEAN. HDI Timor Leste berada di peringkat 120, negara Laos di peringkat 122, Kamboja di peringkat 124 dan Myanmar di peringkat 132 (*La'o Hamutuk*, 2013).

Peran Penting Timor Leste dalam Memelihara Demokrasi dan HAM di Kawasan Asia Tenggara

ASEAN memiliki prinsip dan tujuan menciptakan kontinuitas, mobilitas dan dinamika ASEAN yang harmonis, demokratis, dan menjunjung HAM sebagaimana ditegaskan pada Piagam ASEAN Bab I Pasal 1 Ayat 4 dan 7, sebagai berikut: ayat 4 menyatakan *to ensure that the peoples and Member States of ASEAN live in peace with the world at large in a just, democratic and harmonious environment*. Sementara dalam ayat 7 tersurat tujuan ASEAN juga *to strengthen democracy, enhance good governance and the rule of law, and to promote and protect human rights and fundamental freedoms, with due regard the rights and responsibilities of the Member States of ASEAN*.

Timor Leste hadir dalam satu dasawarsa lebih sebagai salah satu negara berhaluan demokrasi di kawasan Asia Tenggara. Sebagaimana umumnya prosedural politik negara demokrasi, Timor Leste telah berhasil menerapkan sistem pemilu langsung dengan sistem multipartai, menjamin kontrol dan partisipasi politik aktif oleh dan untuk rakyat, menjamin kebebasan pers, serta memperhatikan kesetaraan gender.

Dalam hal kesetaraan gender, Timor Leste telah menyediakan ruang atau kesempatan yang memberi peluang bagi terealisasinya partisipasi perempuan di arena politik dan proses pembuatan kebijakan publik. Kesetaraan gender di Timor Leste antara lain dapat ditinjau dari tingkat partisipasi perempuan dalam parlemen nasional dari sejumlah negara Asia dan Pasifik tahun 2012 yang disurvei oleh *United Nations Economic and Sosial Commission for Asia and the Pacific - UNESCAP* (UNESCAP, 2013). Pada survei tersebut, Timor Leste berada di peringkat kedua, dengan persentase partisipasi perempuan dalam parlemen nasional sebesar 32,3%. Jika dibandingkan negara Laos (25,0%) dan Viet Nam (24,4%).

Timor Leste juga meraih prestasi terkait jumlah perempuan pada posisi atau jabatan menteri se-Asia dan Pasifik tahun 2012 (UNESCAP, 2013). Timor Leste kembali menduduki peringkat kedua dengan persentase jumlah kepemilikan menteri dari kaum perempuan sebesar 23,1%. Peringkat dan persentase Timor Leste tersebut lagi-lagi mengungguli beberapa negara ASEAN lainnya yaitu Filipina (18,2%) dan Kamboja (4,9%). Adapun dari jajaran negara se-Asia dan Pasifik dalam survei tersebut, terdapat dua negara anggota ASEAN yang tidak memiliki satupun menteri dari kaum perempuan yaitu Brunei Darussalam dan Singapura.

Berkenaan dengan isu HAM, Timor Leste telah berupaya menginternalisasikan kaidah HAM dalam konstitusi negara sekaligus menyuarakan pembelaan HAM secara aspiratif di lingkungan Asia Tenggara. Timor Leste berpegang pada prinsip konstitusi nasionalnya yang liberal namun humanis berorientasi pada penghargaan HAM. Salah satunya yaitu adanya aturan pelarangan hukuman mati.

Dalam menyuarakan pembelaan HAM secara aspiratif di lingkungan Asia Tenggara, Timor Leste telah berani mengkritisi dan mengecam negara Myanmar atas situasi sosial-politik domestik yang represif di bawah kontrol kekuasaan junta militer. Kendatipun demikian, Timor Leste telah menunjukkan profesionalismenya dalam menyeimbangkan idealisme dan sikap kritisnya yang aspiratif dalam membela HAM di Myanmar sehingga tetap mampu menjaga hubungan baik dan harmonis dengan tersebut.

Kesimpulan

Meski belum ada kejelasan perihal penerimaan status keanggotaan penuh Timor Leste di ASEAN, namun bisa disimpulkan bahwa Timor Leste memiliki posisi tawar yang tinggi untuk memperoleh status keanggotaan penuh di ASEAN. Berdasarkan Piagam ASEAN, posisi tawar tersebut dapat dinilai dari berbagai pencapaian positif Timor Leste yang bisa dikategorikan telah memenuhi aturan Piagam ASEAN khususnya pada Bab I Pasal 1 mengenai prinsip dan tujuan ASEAN, antara lain:

1. Timor Leste mampu berkontribusi dalam pemeliharaan stabilitas keamanan kawasan Asia Tenggara serta posisi Timor Leste sendiri di kawasan menjadi pertimbangan penting terhadap stabilitas keamanan kawasan oleh ASEAN (Dengan ini Timor Leste memenuhi aturan Piagam ASEAN bab I Pasal 1 Ayat 1, 3, dan 8.);
2. Timor Leste mampu berpartisipasi secara positif dalam kerjasama regional dan cukup berhasil melakukan program *capacity building* di kawasan Asia Tenggara sebagaimana tujuan organisasi yang tertulis dalam Piagam ASEAN bab I Pasal 1 Ayat 2, 6, dan 11.
3. Timor Leste mampu berpartisipasi secara aktif dan positif dalam memelihara demokrasi dan HAM di kawasan Asia Tenggara dan karenanya berhasil memenuhi prinsip Piagam ASEAN bab I Pasal 1 Ayat 4 dan 7.

Pada tahun 2015 mendatang, ASEAN akan menyongsong mulai berlakunya *ASEAN Community 2015* yang merupakan *grand design and agenda* dari ASEAN sebagai upaya evaluasi dan pendalaman kohesivitas integrasi antarnegara anggota ASEAN pada tiga pilar yaitu politik-keamanan, ekonomi, dan sosio-kultural. Besar kemungkinan agenda ASEAN tersebut akan dapat menjadi penentu kepastian permohonan status keanggotaan penuh Timor Leste di ASEAN. Berdasar kajian yang telah dilakukan ini, terdapat dua kemungkinan (skenario) yang akan terjadi yakni, **pertama**, ASEAN akan memutuskan untuk menerima status keanggotaan penuh Timor Leste di ASEAN pada beberapa bulan sebelum tahun 2015, dan nantinya secara bersamaan seluruh anggota ASEAN akan menyambutnya sebagai anggota baru pada awal berlangsungnya *ASEAN Community 2015*. **Kedua**, ASEAN akan menerima status keanggotaan penuh Timor Leste namun setelah *ASEAN Community 2015*. Kemungkinan yang kedua ini didasarkan pada asumsi bahwa ASEAN perlu memberi ruang dan kesempatan adaptasi dahulu bagi Timor Leste sebelum bergabung dalam *ASEAN Community*.

Daftar Pustaka

Buku

- Arikunto, Suharsimi. 1989. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Basu, Rumki (Ed.). 2012. *International Politics: Concept, Theories, And Issues*. SAGE Publications India Pvt Ltd.
- Cipto, Bambang. 2010. *Hubungan Internasional Di Asia Tenggara: Teropong Terhadap Dinamika, Kondisi Riil Dan Masa Depan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Cetakan II.
- Djelantik, Sukawarsini. 2008. *Diplomasi Antara Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu. Cetakan pertama.
- The Liang Gie. 1984. *Ilmu Politik: Suatu Pembahasan Tentang Pengertian, Kedudukan, Dan Metodologi*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Mas'ood, Mohtar. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3S, Jakarta.
- Roy, S.L. (Penerjemah: Herwanto, Mirsawati). 1991. *Diplomasi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sitepu, P. Anthonius. 2011. *Studi Hubungan Internasional*. Medan: Penerbit Graha Ilmu.
- Wahyono, Kristio. 2009. *Sepuluh Tahun Tragedi Timtim: Timor Target*. Banda Aceh: Penerbit Krueng Aceh.
- Yusuf, Suffri, S.H. 1989. *Hubungan Internasional Dan Politik Luar Negeri: Sebuah Analisis Teoretis Dan Uraian Tentang Pelaksanaannya*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Internet

- Alkatiri, Ibnu Mashud (UPN Veteran-Yogyakarta). 2012. *Hambatan Timor Leste Mendapatkan Status Keanggotaan Penuh ASEAN*. <http://repository.upnyk.ac.id/4343/1/RESUME.PDF>. [Diakses pada tanggal 2 Oktober 2013].
- ASEAN Secretariat. 2012. *Instrument of Accession to The Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia*. <http://www.asean.org/news/item/instrument-of-accession-to-the-treaty-of-amity-and-cooperation-in-southeast-asia>. [Diakses pada tanggal 2 Maret 2014].
- Guterres, Julio Gil da Silva, B.A. 2012. *ASEAN Without Timor Leste: State Without Sovereignty*. <http://www.thepresidentpost.com/2012/12/17/asean-without-timor-leste-state-without-sovereignty/>. [Diakses pada tanggal 20 Maret 2014].
- Kemlu RI. *ASEAN-Charter*. <http://kemlu.go.id/Documents/ASEAN-Charter.pdf>. [Diakses pada tanggal 20 November 2013].
- Ministério dos Negócios Estrangeiros-Timor Leste (Kementerian Luar Negeri-Kemenlu Timor Leste). 2011. *The First Asean Regional Forum (ARF) Meeting In Timor-Leste*. <http://mnerdtimorleste.blogspot.com/2011/02/first-asean-regional-forum-arf-meeting.html>. [Diakses pada tanggal 2 Maret 2014].
- Ravichandran, R. 2009. *Timor Leste Hopes Asean Will Relax Conditions On Membership*. <http://www.etan.org/et2006/july/29/25tlhope.htm>. [Diakses pada tanggal 3 Maret 2014].
- The Timor-Leste Institute for Development Monitoring and Analysis (La'o Hamutuk). 2013. *Timor-Leste Human Development Index improves very slightly: As reported in 2013 UNDP Human Development Report*, <<<http://www.laohamutuk.org/econ/HDI10/2013/13HDI.htm>>> [Diakses pada tanggal 30 Maret 2014].
- UNESCAP. 2013. *Women's empowerment-Statistical Yearbook for Asia and the Pacific 2013*. <http://www.unescap.org/stat/data/syb2013/>. [Diakses pada tanggal 20 Maret 2014]
- WIPO (World Intellectual Property Organization). 2002. *Timor-Leste: Constitution of the Democratic Republic of Timor-Leste*. http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=196269. [Diakses pada tanggal 19 Oktober 2013].
- Wuryandari, Ganewati. 2011. *East Timor's Membership in ASEAN: Prospects and Challenges*. www.aseancenter.org.tw/upload/files/OUTLOOK_003_02.pdf. [Diakses pada tanggal 1 April 2014].
- Ximenes, Alarico Da Costa. 2011. *Kepentingan Dan Diplomasi Timor Leste Di ASEAN*. http://www.tlstudies.org/pdfs/tlsa%20conf%202011/chp_54.pdf. [Diakses Pada Tanggal 5 Oktober 2013].